

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu juga yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana pemerintah merevisi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.¹ Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang terpublikasi itu sangat diperlukan oleh banyak pihak untuk bahan pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LKPD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas supaya bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus

¹ Rizal Pramudiarta, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD Di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal)**, Sikripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015, hal. 3

mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintahan, namun tidak terbatas pada: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman daerah; (d) pemerintah.²

Mengingat pentingnya informasi laporan keuangan, pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yang merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.³

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai manfaat atau nilai, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat, 2012, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – hal. 5

³ Sondang M Wijaya Tamba, Pengaruh Sumber Daya Manusia, Kemajuan Teknologi dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara, Sikripsi, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 4

Pemerintahan, terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat diperbandingkan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Yuliani *et al*, bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit.⁴ Untuk mengatasi rendahnya kualitas laporan keuangan maka sangat diharapkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar oleh Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PPKD/BUD tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya bahwa belum tertibnya laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia

⁴ Yuliani *et.al.*, **Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)**, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 3. No. 2, 2010, hal. 206-220

(SDM) yang memahami dan kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Nasrudin (2008), bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.⁵ Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah, seperti pemahaman akan SAP, Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas.⁶

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al.* (2010) dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh), penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Iqlima A. Manaf, *et al.* (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh baik langsung maupun tidak langsung pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan

⁵ Sari *et al.*, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)**, *e-Journal Ak Universitas Pendidikan Genesha*, Volume 2, No. 1, 2014

⁶ Loc.Cit

keuangan. Penjelasannya mengatakan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kemampuan memahami tentang standar akuntansi pemerintahan (*partially mediated*).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kecukupan pengungkapan (*disclosure*), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern (SPI), serta dukungan peran audit internal dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah wajib dikelola oleh Aparatur Pemerintah yang kompeten secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan peran dari audit internal untuk mencapai tujuan organisasi. Peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷ Kemudian untuk menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan melakukan

⁷ Inapty dan Martiningsih, **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9 (I), 2016, hal. 30

tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan maka diperlukan peran pengawas (audit intern) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif.⁸

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.⁹

Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁰ Adanya peran audit internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan Setyowati dan Isthika (2014) yang menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al* (2010) menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Inapty dan Martiningsih (2016), yang hasilnya menunjukkan

⁸ Akhmad Syarifudin, **Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi empiris pada Pemkab Kebumen)**, Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No. 02, 2014, hal. 28

⁹ Dian Irma Diani, **Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)**, Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Padang, 2014, hal. 3-4

¹⁰ *Loc. Cit*

bahwa peran audit internal (PAI) tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan, dimana opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada empat kriteria yaitu: (1) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), (2) ketaatan terhadap perundang-undangan, (3) kecukupan pengungkapan (*disclosure*), dan (4) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan¹¹. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini WTP terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

¹¹ Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti, **Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015**, Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 20

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan SAP dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Dalam kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat dari Tahun 2012–2017 yaitu wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP). LKPD Kabupaten Nias Barat tahun 2012-2014 berturut-berturut mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Pada tahun anggaran 2015 LKPD Kabupaten Nias Barat mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti adanya peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Nias Barat memperoleh opini disclaimer. Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, LKPD Kabupaten Nias Barat secara berturut-turut mendapat opini disclaimer dari BPK. Ini berarti adanya penurunan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2015, dimana Pemerintah Kabupaten Nias Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang diterima oleh Kabupaten Nias Barat tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai kemungkinan telah terjadi banyak penyimpangan anggaran. Penurunan opini tersebut terjadi karena ketidaksesuaian dengan SAP, kelemahan sistem

pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kabupaten Nias Barat, untuk hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2012 – 2017 memperoleh opini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Nias Barat
Tahun 2012 – 2017

No.	Tahun	Opini
1	2012	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
2	2013	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
3	2014	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2016	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
6	2017	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Sumber: www.medan.bpk.go.id

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena lemahnya pengawasan internal, penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan sistem pendendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal dan**

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Nias Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang berfokus secara sistematis. Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Pengaruh peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Nias Barat.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat, dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan wawasan kepada pihak SKPD dalam mengembangkan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

- 3) Bagi Penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam penelitian berikutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi: faktor pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*disclosure*), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern (SPI), serta dukungan peran audit internal dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, maka peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan batasan masalah yaitu Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Nias Barat yaitu pada 9 SKPD: 1 Sekretaris Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), 5 Dinas meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA).

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah **“laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”**¹².

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, **Op.Cit.**, hal. 6 Lampiran I.02 PSAP 01

4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Menurut Lirrank mengemukakan bahwa data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna.¹³ Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan memperoleh informasi.¹⁴

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD, tiap kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan dalam akuntansi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan

¹³ Nurillah, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok.** Sikripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal. 25 (<http://eprints.undip.ac.id/42846/1/NURILLAH.pdf>), diakses 27 Desember 2018

¹⁴ Akhmad Syahrifudin. **Op.Cit**, hal 31.

keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan financial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Lebih;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembuatan laporan keuangan tersebut dilakukan oleh masing-masing Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.3 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Erlina *et al* mengemukakan:

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi, yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping laporan keuangan bertujuan

¹⁵ Erlina *et al.*, **Akuntansi keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 19

umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Dalam Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber sumber daya yang dipercayakan kepadanya.¹⁶

Seperti yang kemudian dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) **Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;**
- b) **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
- c) **Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;**

¹⁶ Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Tual)**, JURNAL STIE SEMARANG VOL. 5, NO 3, Edisi Oktober 2013, hal. 97

- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;**
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;**
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah;**
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.**

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Menurut Mardiasmo secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- a) Kepatuhan dan pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)**
- b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)**
- c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)**
- d) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)**
- e) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)**

f) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*).¹⁷

2.1.4 Fungsi Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi
5. Evaluasi Kinerja.

Fungsi laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

¹⁷ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 161

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Setelah memahami pentingnya tujuan dan fungsi pelaporan keuangan yang telah diuraikan di atas, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas aparat pemerintah yang melakukan pengelolaan atau penatausahaan keuangan. Pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), begitu juga dengan dukungan peran audit internal dari aparat pengawas intern pemerintah (APIP) serta kompetensi sumber daya manusia sangat perlu ditingkatkan karena ketiga faktor tersebut mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

2.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸ Shahwan (2008) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipenuhi jika tingkat kemahiran dan persiapan pelaporan keuangan didasarkan sepenuhnya pada Standar Akuntansi Pemerintahan.¹⁹

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang

¹⁸ Iqlima A. Manaf *et al.*, **Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**, Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No. 4, 2014, hal 24

¹⁹ *Ibid*

akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP. Oleh karena itu, orang yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan ataupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat atau yang disajikan berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP disusun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang memuat 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah seperti yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran

3. PSAP 03: Laporan Arus Kas
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06: Akuntansi Investasi
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi
12. PSAP 12: Laporan Keuangan Operasional

Menurut Yuliani et al, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.²⁰ Pemahaman terhadap SAP ini diharapkan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). Dengan demikian informasi laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai manfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

²⁰ Yuliani *et al*, **Op.Cit.**, hal. 206-220

2.3 Peran Audit Internal

The Institute of Internal Auditor (1999) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.²¹

Sawyer mengemukakan bahwa audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti;
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.²²

Audit internal mempunyai peranan yang sangat krusial dalam proses pencapaian tujuan perusahaan/organisasi yang telah ditentukan. Audit internal merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di

²¹ Loc.Cit

²² Lawrence B. Sawyer, **Internal Auditing**, Edisi 5 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. 10

dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya suatu kegiatan/aktivitas/program.²³

Internal Audit di Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran sangat penting. Inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sesuai pasal 1 ayat 3 PP No. 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Peran audit internal berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersirat di dalam pasal 9 (1) UU No. 15 Tahun 2004, bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).²⁴ Peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.²⁵

²³ Lusi Novita Sari, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)**, ARTIKEL ILMIAH, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2014, hal. 4

²⁴ Akhmad Syarifudin, **Op.Cit.**, hal. 32

²⁵ *Ibid*, hal. 32

Menurut Tim Penyusun Modul Program pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) dalam Irma Diani (2014), tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 2) Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
- 3) Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 4) Mereview sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
- 5) Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
- 6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.

²⁶ Dian Irma Diani, *Op.Cit.*, hal. 8

- 7) Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
- 9) Mengkoordinasikan pekerjaan audit dengan aparat pengawas (auditor) eksternal (BPK).

Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang APIP, Peran audit internal tidak terbatas pada pengawasan keuangan tetapi mendapat peran baru untuk melakukan pembinaan/konsultasi disamping melakukan review laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan intern tersebut berkaitan erat dengan sistem pengawasan keuangan negara. Sistem pengawasan terdiri dari lembaga-lembaga pengawasan fungsional yang disusun berlapis-lapis. Lembaga pengawasan terdiri intern atau APIP dan lembaga ekstern atau aparat pengawasan pemerintah. APIP meliputi BPKP yang berada di bawah Presiden dan Inspektorat jenderal Departemen yang berada dibawah departemen.²⁷

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyele-

²⁷ *Ibid, hal. 32*

nggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan:

1. Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

- b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten-Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan tugas pengawasan, aparat pengawas intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan hasil pengawasan dapat berupa hasil audit, laporan hasil reuiu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil pemantauan.

Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Yang dimaksud dengan independen adalah aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya.²⁸ Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata

²⁸ Akhmad Syarifudin, *Op. Cit.*, hal. 31

masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgent* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Moeheriono (2009) dikutip dari Mahardini dan Miranti (2018) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu tertentu.²⁹

Menurut Sutrisno mengemukakan:

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan³⁰.

Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Sejalan dengan itu, Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Furham (1990), Aruan (2003), Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik.³¹ Menurut Spencer dan Spencer (1993) dikutip dari Sutrisno (2009), mengatakan bahwa **“kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik**

²⁹ Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti, **Dampak Penerapan..., Op. Cit.**, hal. 26

³⁰ Sutrisno, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 203

³¹ Inapty dan Martiningsih, **Op.Cit.**, hal. 6

dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.”³² Karakteristik yang mendasari kompetensi berarti berupa kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dirinya dan dapat diramalkan perilaku di dalam suatu tugas pekerjaan.

Evicahyani dan Setiawina, kompetensi SDM adalah karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan.³³ Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat dari kemampuan mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001), Alimbudiono & Fidelis (2004) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.³⁴ Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan

³² Sutrisno, **Op.Cit**, hal. 202

³³ Evicahyani dan Setiawina, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan**, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.5, No 3, Bali, 2016, hal. 8

³⁴ Nurillah, **Op.Cit.**, hal. 27 (<http://eprints.undip.ac.id/42846/1/NURILLAH.pdf>), diakses 27 Desember 2018

kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karenanya, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Soimah (2014) dikutip dari Kiranayanti dan Erawati (2016), kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi

buruk.³⁵ Hal ini menunjukkan semakin baik kapasitas sumber daya manusia semakin baik kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.³⁶

Berdasarkan uraian sumber daya manusia yang kompeten, yaitu mencakup: pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan dan pengalaman kerja.

1. Pendidikan Formal

Secara formal pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Melalui pengajaran dan pelatihan.

Menurut Malaya S.P. Hasibuan mengatakan **“pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan.”**³⁷ Sedangkan itu menurut Soekidjo Notoadmodjo dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno bahwa **“pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan.”**

Selain itu juga, menurut Hidiracman dalam Tiuthu Yuniarshih dan Suwatno mengatakan:

Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

³⁵ Kiranayanti dan Erawati, **Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**, E-Jurnal Akuntans Universitas Udayana, Vol. 16, 2, Bali, 2016, hal. 1294

³⁶ **Loc.Cit.**

³⁷ H. Malaya S.P. Hasibuan, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Revisi: PT Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektual seseorang. Tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya, karena pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan di latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan agar lebih mudah mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukannya. Indikator pendidikan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal pegawai, kesesuaian kompetensi bidang pendidikan, serta kemampuan penyajian laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Azril Azhari mengemukakan:³⁸ **“pelatihan merupakan tempat untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan dalam bekerja.”**

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan

³⁸ Azril Azhari, sebagaimana dikutip dari Citra Hhiyarotun Nisa, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus di DPKAD Kota Bandung)**, Sikripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2016, hal. 26 (<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7228>) diakses 28 Desember 2018

datang, dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik pada saat ini. Beberapa tujuan dari pendidikan dan pelatihan pegawai, diantaranya:

- 1) Meningkatkan produktivitas kerja
- 2) Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai.
- 3) Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu.
- 4) Mengurangi tingkat kesalahan pegawai.
- 5) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan/atau organisasi.
- 6) Menjaga moral pegawai yang baik.
- 7) Meningkatkan karier pegawai

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberi dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dan benar dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung menandakan seseorang pernah bekerja dan

lamanya bekerja dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya atau dalam jabatan pekerjaan yang pernah didudukinya pada suatu organisasi. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti.

Penyusunan laporan keuangan, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang telah lama dibidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Pengalaman pegawai/karyawan dalam bekerja akan memberikan kemampuan bagi pegawai/karyawan tersebut terutama kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya yang terdapat di dalam struktur organisasi dan standar operasional prosedur yang ada. Jika semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan makin memahami apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

2.5 Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pihak

pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai entitas ekonomi, terutama mengenai keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.³⁹ Laporan keuangan yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat informasi (*information content*). Shahwan (2008) menjelaskan bahwa supaya laporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif.⁴⁰

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2012: KK-10) Karakteristik Kualitatif laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya. Keempat Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami.

³⁹ Menurut Beest, Braam, dan Boelens (2009) dikutip dari Iqlima A. Manaf, et al., **Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh**, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No. 4, November 2014, hal. 26

⁴⁰ Iqlima A. Manaf et al., **Op.Cit.**, hal. 3

Keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini adalah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Inapty dan Martiningsih (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan

		Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal . Variabel. Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan	(PSAP), Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal dan Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2	Yuliani, et al (2010)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit. Variabel Dependen: Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Setyowati dan Isthika (2014)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang	Variabel Independen: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Internal	Secara Parsial maupun secara simultan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit

			Audit. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel.
4	Novita Sari (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (<i>Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci</i>)	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Pemerintah. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

Sumber: Berbagai jurnal ilmiah, 2019

2.7 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

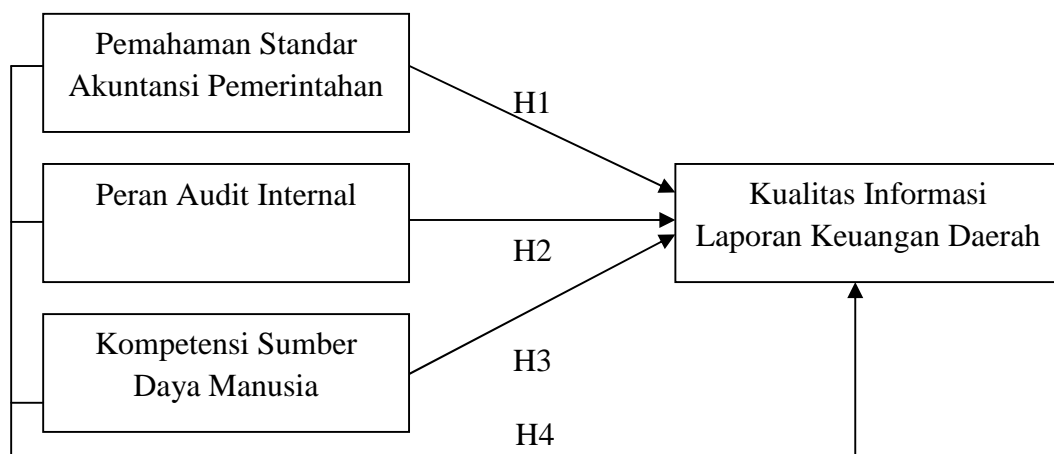
2.7.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, adanya dukungan peran audit internal dari aparat pengawas intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada model Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP adalah prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi laporan keuangan menjadi semakin baik.

Iqlima A. Manaf *et al* mengatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kemampuan memahami tentang standar akuntansi pemerintahan (*partially mediated*). Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al* (2014), menyatakan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, *et al* (2010) menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan yaitu:

H1 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit satuan kerja sebagai bagian integral dalam organisasi pemerintah daerah. Dengan semakin baiknya proses kegiatan audit yang dilakukan oleh peran auditor internal (APIP) ke instansi-instansi pemerintah tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai Peran audit internal telah dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Setyowati dan Isthika (2014) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan yaitu:

H2 : Peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan *human capital* di dalam organisasi. Nurillah mengemukakan bahwa *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*.⁴¹ Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan memungkinkan terwujudnya informasi laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Setyowati dan Isthika (2014), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Novita Sari (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kemampuan memahami tentang standar akuntansi pemerintahan

⁴¹As Syifa Nurillah, Dul Muid, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)**, *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 3 Nomor 2, 2014, hal. 3

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan yaitu:

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah

4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penjelasan hipotesis pertama, kedua dan ketiga yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pemahaman yang benar dan luas tentang standar akuntansi pemerintahan maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Selain itu adanya peran audit internal selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dapat dirumuskan yaitu:

H4 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Sugiyono menyatakan bahwa variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁴² Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y) dan Variabel Independen adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Peran Audit Internal (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Umar mengemukakan bahwa **“Desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya.”**⁴³ Dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada tanggal 27 Februari – 6 Maret 2019 dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

⁴² Sugiyono, **Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 39

⁴³ Husein Umar, **Metode Penelitian untuk Sikripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 35

pegawai bagian akuntansi/keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Alasan penelitian ini dilakukan di SKPD Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat karena ingin memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Peran Audit Internal (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y). Berikut dijelaskan definisi dan operasionalisasi variabel yaitu:

Tabel 3.1

Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Butir
X1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Pemahaman tentang SAP adalah kemampuan memahami terhadap penyajian, komponen, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan serta kesalahan koreksi dan laporan konsolidasi (PP Nomor 71 Tahun 2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terhadap penyajian laporan keuangan • Pemahaman tentang komponen dalam laporan keuangan • Pemahaman tentang pengakuan unsur-unsur laporan keuangan • Pemahaman tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa • Pemahaman tentang laporan keuangan konsolidasian 	Skala likert 1-5	12 Butir

X2 Peran Audit Internal	Peran audit internal adalah pemeriksa yang berperan dalam mengawasi, mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu instansi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian keandalan informasi keuangan • Penilaian ketaatan • Penilaian kinerja • Penilaian efisiensi dan efektivitas program • Tingkat obyektivitas auditor internal 	Skala likert 1-5	9 Butir
X3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisno, 2009).	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dan pemahaman terhadap standar • Pengetahuan dalam bidang akuntansi • Kemampuan terhadap peraturan • Pendidikan dan pelatihan • SDM memiliki pengalaman 	Skala likert 1-5	7 Butir
Y Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Sejauh mana informasi konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka (Surastiani, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas keuangan di masa lalu • Memprediksi masa yang akan datang • Ketepatan waktu penyajian • Pengambilan keputusan • Disajikan wajar dan jujur • Informasi dapat diperbandingkan • Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami sesuai SAP. 	Skala likert 1-5	9 butir

Sumber: Data diolah

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Sugiyono mengemukakan **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”**⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Nias Barat. Namun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hanya beberapa SKPD yang terdiri dari: 1 Sekretaris Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 BPKPAD, 5 Dinas (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga) Kabupaten Nias Barat yang berjumlah 9 SKPD.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan. Dengan demikian, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁵ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian keuangan, dan para staf yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Nias Barat.

Penyampelan atas responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sekaran menyatakan, *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁴Sugiyono, **Op.Cit.**, hal. 80

⁴⁵*Ibid*, hal. 81

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada setiap SKPD Kabupaten Nias Barat yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yang meliputi bagian keuangan, bendahara dan para *staff*.
2. Pejabat yang bertanggung jawab di bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD.
3. Pegawai/Staf bagian akuntansi yang disebut Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD);
4. Pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan APIP dari Inspektorat.

Selanjutnya, kriteria yang diambil dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan dan Lama Bekerja. Selain itu juga pegawai yang memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan telah bekerja minimal 1 (satu) tahun pada SKPD tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 SKPD di Kabupaten Nias Barat yang berjumlah 36 responden yang masing-masing SKPD ada 4 (empat) orang responden. Adapun 36 responden yang dijadikan sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
SAMPEL PENELITIAN

No	JABATAN	JUMLAH RESPONDEN
Sekretaris Daerah		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2

Sekretariat DPRD		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Dinas Perhubungan		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Dinas Pendidikan		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
2	Bendahara	1
3	Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Total Jumlah Responden		36 Orang

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terstruktur dan responden tinggal memberi tanda *Checklist* (). Kuesioner disebarkan langsung ke responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

3.8 Skala Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.⁴⁶ Untuk kemudahan dalam penelitian ini disediakan lima alternatif jawaban dari setiap pertanyaan dan masing-masing diberi skor yaitu: 5 = Sangat Setuju (SS), 4 =

⁴⁶ *Ibid hal. 93*

Setuju (S), 3 = Ragu-ragu (R)/Kurang Setuju (KS)/ Netral (N), 2 = Tidak Setuju (TS), dan 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).⁴⁷

3.9 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat didasarkan pada penelitian terdahulu dan/atau dimodifikasi oleh peneliti. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya keusioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Kriteria keputusan valid tidaknya kuesioner diperoleh dari korelasi tiap faktor positif dan besarnya $> 0,30$. Rumus korelasi *product moment*:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X \sum Y)}{[\sum X^2 - (\sum X)^2] [\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

⁴⁷ Sugiyono, Op.Cit., hal. 94

Keterangan :

r = koefisien korelasi *product moment*

N = jumlah responden

X = skor untuk masing-masing item pernyataan

Y = jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing-masing responden.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawabannya dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Sekaran, untuk menguji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi, pengujian ini meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong kiri atau ke kanan). Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan metode *Kolmogorov smirnov* dengan melihat signifikansi pada taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai *Sig* $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Sig* $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen).⁴⁸ Menurut Ghozali (2011), pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 10 dan *tolerance* > 10 . Jika *tolerance value* dibawah 0,10, maka terjadi gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan uji Grafik *Scatter plot* yang terdapat dalam program komputer *SPSS 22.0 for Windows*. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi dari heteroskedastisitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di

⁴⁸ Husein Umar, **Op.Cit.**, hal. 177

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap Variabel Y.

Penelitian ini juga menggunakan uji *Glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji statistik ini dapat menjamin keakuratan hasil. Kriteria dari uji *Glejser* adalah apabila nilai t statistik dari seluruh variabel masing-masing memiliki nilai p *value* > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan data tersebut dapat dikatakan bersifat homokedastisitas.⁴⁹

3.11 Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan.⁵⁰ Analisis berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen, yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Persamaan regresi berganda dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

⁴⁹ Ghazali, 2013, sebagaimana dikutip dalam Sikrpisinya Arlia Sari Artana, 2016, hal. 64

⁵⁰ Safrida Yuliani, Nadisyah, Usman Bakar, **Op Cit.**, hal. 206-220

X2 = Peran Audit Internal

X3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien X1, X2, X3

e = error

3.11.1 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia) dalam menjelaskan variabel dependen (kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah).

3.11.2 Uji Regresi Parsial (*T-test*)

Uji regresi parsial bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individual (secara parsial) terhadap variabel dependen yang menganggap variabel lain bersifat konstan.

Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat kepercayaan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

3.11.3 Uji Regresi Simultan (*F-test*)

Uji regresi simultan (F-test) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara bebas dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Pengujian dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}(\alpha) 0,05$ maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}(\alpha) 0,05$ maka hipotesis ditolak. Uji F dapat dilihat pada *output* ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda, dengan kriteria pengujian.